

Peran Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Implementasi Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Nofriadi¹, Alga Sabnu², Muhammad Ilham Qautsar³, Nurul Azizah Siregar⁴ Syarifah Nadila⁵

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

Article Info

Article history:

Accepted: 22 April 2025

Publish: 5 May 2025

Keywords:

Peran Partai Politik

Article Info

Article history:

Diterima: Tanggal, Bulan, Tahun

Terbit: Tanggal, Bulan, Tahun

Abstract

Penelitian ini membahas peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mendorong penerapan dan penguatan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Sebagai partai berbasis Islam yang memiliki kekuatan politik signifikan di daerah tersebut, PKS aktif mengarahkan kebijakan dan program pemerintah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui anggota DPRK dan Fraksi Pengawas Daerah, PKS mendorong regulasi yang adil, mengawasi pelaksanaan syariat agar tidak disalahgunakan sebagai alat politik, serta memastikan semua dinas di kota tersebut ikut berperan, tidak hanya Dinas Syariat Islam. PKS juga memberi perhatian terhadap kritik dari kelompok perempuan dan non-Muslim, dengan upaya menyikapi secara bijak dan tetap menjaga semangat penerapan syariat sebagai solusi sosial, bukan simbol politik. Selain itu, PKS melakukan evaluasi internal terhadap anggota dewan guna menjaga komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Partai ini juga fokus pada pembinaan kader, pelayanan publik yang bersih, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan agar pelaksanaan syariat Islam tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial modern.

Abstract

This study explores the role of the Prosperous Justice Party (PKS) in promoting the implementation and strengthening of Islamic law (Sharia) in Banda Aceh City. As an Islamic-based political party with significant influence in the region, PKS actively directs government policies and programs to align with Islamic values. Through its members in the local legislative council (DPRK) and the Regional Oversight Faction, PKS promotes fair regulations, monitors the implementation of Sharia to prevent its misuse for political purposes, and ensures that all government agencies, not only the Department of Islamic Sharia, are involved in upholding Islamic principles. PKS also pays attention to criticism from women and non-Muslim groups, responding wisely while maintaining the spirit of Sharia as a social solution rather than a political symbol. Additionally, PKS conducts internal evaluations of its legislative members to uphold their commitment to Islamic values. The party also emphasizes cadre development, clean public services, and active community participation in policymaking to ensure that Sharia implementation remains relevant and adaptive to modern social dynamics.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Alga Sabnu

Universitas Syiah Kuala

Email: alqasabnu04@gmail.com

1.PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Meskipun menganut sistem demokrasi Pancasila yang tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara, nilai-nilai agama tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Di wilayah Aceh, terdapat kekhususan dalam penerapan hukum Islam yang tidak ditemui di daerah lain. Kekhususan ini dijamin melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan otonomi khusus kepada pemerintah daerah, termasuk dalam menerapkan syariat Islam. Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh menjadi pusat pelaksanaan syariat Islam, baik secara simbolis maupun

administratif. Pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada peraturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik lokal. Salah satu partai yang cukup menonjol dalam hal ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dikenal memiliki visi dan misi berbasis nilai-nilai Islam.

PKS sudah lama berperan aktif dalam mendorong kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Di Banda Aceh, partai ini terlibat dalam proses legislasi, pengawasan terhadap kebijakan, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk melihat secara lebih dekat bagaimana peran PKS dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh, baik melalui jalur formal seperti DPRK maupun lewat pendekatan informal di tengah masyarakat. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana politik dan agama berjalan beriringan dalam konteks demokrasi lokal. Selama ini, kajian tentang partai politik Islam lebih banyak membahas skala nasional, sedangkan kajian di tingkat lokal, terutama yang berkaitan dengan penerapan syariat, masih terbatas. Penelitian ini mencoba mengisi ruang tersebut dengan fokus pada peran PKS di Banda Aceh.

Di sisi lain, penerapan syariat Islam di Banda Aceh juga menghadapi tantangan. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bagian dari identitas lokal, namun tidak sedikit pula yang memberikan kritik, terutama terkait perlakuan terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Dalam kondisi seperti ini, posisi partai politik seperti PKS menjadi sangat penting, karena mereka memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan sekaligus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan syariat tetap adil dan manusiawi.

Pelaksanaan syariat di Banda Aceh diatur dalam sejumlah qanun, seperti Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah dan Ibadah, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perjudian, serta Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Keberhasilan pelaksanaan qanun ini sangat bergantung pada peran aktif para pelaku politik di daerah, termasuk partai seperti PKS.

Sebagai partai yang memiliki identitas keislaman yang kuat, PKS dikenal luas dengan perjuangannya dalam mengangkat isu-isu moral dan agama ke dalam ranah kebijakan. Di Banda Aceh, partai ini cukup mendapatkan dukungan dari masyarakat karena pendekatannya yang sesuai dengan budaya lokal yang religius.

Secara ideologis, PKS berada di jalur politik Islam yang cenderung moderat, tetapi tetap berkomitmen pada upaya memperjuangkan syariat melalui cara-cara demokratis. Di Aceh, partai ini menyesuaikan pendekatannya agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Meskipun secara nasional PKS sering dikaitkan dengan sikap konservatif, di Banda Aceh partai ini lebih diterima karena nilai-nilai keagamaannya selaras dengan budaya masyarakat setempat. Meski tidak selalu dominan secara jumlah kursi di DPRK, PKS mampu membentuk kerja sama politik dan menempatkan kader-kadernya di posisi strategis pemerintahan. Hal ini memberikan ruang bagi PKS untuk mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan syariat Islam. Selain itu, struktur kaderisasi yang kuat dan jaringan sosial yang luas turut mendukung efektivitas peran politik PKS di Banda Aceh.

Di tengah masyarakat, tanggapan terhadap penerapan syariat dan peran partai seperti PKS pun beragam. Banyak warga yang mendukung karena merasa bahwa nilai-nilai Islam adalah bagian dari identitas mereka. Namun, kelompok muda dan perempuan mulai mempertanyakan aspek keadilan dari beberapa peraturan, terutama terkait hukuman fisik dan pengawasan terhadap aktivitas sosial. Maka dari itu, peran PKS tidak hanya penting dalam pembuatan aturan, tetapi juga dalam menjembatani aspirasi masyarakat yang semakin beragam. Secara akademik, kajian tentang partai politik Islam dan penerapan syariat masih terbatas di level daerah. Kebanyakan studi fokus pada dinamika nasional atau pada peran ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Penelitian ini hadir untuk memberikan

gambaran yang lebih dalam tentang bagaimana partai Islam seperti PKS memainkan perannya di tingkat lokal.

Kesimpulannya, pembahasan tentang PKS dan penerapan syariat Islam di Banda Aceh tidak hanya berkaitan dengan politik kekuasaan, tetapi juga menyangkut bagaimana nilai-nilai agama diimplementasikan dalam kehidupan demokrasi dan masyarakat yang majemuk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih luas tentang peran partai Islam dalam membentuk arah kebijakan publik dan wajah keislaman di ruang publik Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami pandangan dan peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh. Metode ini digunakan karena lebih cocok untuk menggali makna di balik fenomena sosial dan politik secara mendalam, terutama dalam situasi yang alami dan tidak bisa dimanipulasi seperti eksperimen laboratorium.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh dari PKS dan pihak terkait lainnya, sedangkan observasi dilakukan terhadap kegiatan partai dan proses legislasi yang berlangsung. Dokumen-dokumen yang dikaji antara lain berupa qanun, risalah rapat, serta publikasi media.

Dalam prosesnya, peneliti berfungsi langsung sebagai alat utama untuk memperoleh data. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi dengan topik, dan dilanjutkan dengan teknik snowball, di mana informan awal merekomendasikan informan berikutnya. Agar data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya, dilakukan triangulasi, yaitu dengan menggabungkan beberapa teknik dan sumber data untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Proses analisis data dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pola-pola atau tema yang muncul dari data lapangan. Fokus utama dari analisis ini bukan pada angka atau generalisasi, melainkan pada pemahaman terhadap makna sosial (Sugiyono, 2015: 15).

Sasaran kajian dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:.

Table 1.

Variable	Teknik Pengumpulan Data	Tujuan Analisis
Peran PKS dalam Legislasi Syariat	Wawancara, Dokumentasi	Menggali kontribusi kebijakan
Strategi Sosialisasi Nilai Islam	Observasi, Wawancara	Memahami pendekatan kepada masyarakat
Respons terhadap Kritik Publik	Dokumentasi, Wawancara	Menganalisis sikap partai terhadap kritik

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia, salah satunya di Provinsi Aceh. PKS di Aceh sudah dua kali menjadi partai pemenang sebagai kursi dari meraih suara terbanyak di Kota Banda Aceh. Dari PKS sendiri telah mengarahkan kepada selaku anggota DPRK Kota Banda Aceh agar setiap kegiatan ataupun setiap program itu tidak boleh ada yang melanggar syariat Islam. PKS juga memastikan agar ada program-program yang menyentuh kepada kegiatan-kegiatan

untuk penguatan syariat islam. Oleh karena itu partai PKS merupakan partai yang sangat fokus ketika menyuarakan agar kegiatan-kegiatan ataupun pogram-program di Banda Aceh selalu menyentuh nilai-nilai agama islam. Agar selalu menguatkan, dan pemerintah mendukung selaku terdepan dalam stakeholder pengerahnya syariat islam ini seperti dari Dinas Syariat Islam.

Berbicara terkait islam bukan hanya dari Dinas Syariat Islam saja akan tetap melebitkan yang lain seperti Dinas Pendidikan Dayah, Satpol PP dan WH. Akan tetapi terkait syariat islam bukan hanya sebagai simbol terhadap tiga dinas tersebut akan tetapi seluruh dinas-dinas yang lainnya, bahkan kita juga mengharapkan pimpinan di kota Banda Aceh kemudian juga pemangku kepentingan di Banda Aceh, itu benar-benar menjaga dan menjadikan syariat islam itu sebagai landasan awal dan utama dalam setiap kegiatan. Yang artinya adalah tidak hanya menjadi mainan ataupun menjadi isu politik saja. Di Banda Aceh ada seperti program Gampong syariat yang dapat menyibukkan masyarakat agar lebih terarah, semakin terjaga keislamannya, semakin kuat keislamannya dan masyarakatnya juga bangga akan adanya hal tersebut karena dapat menjalankan syariat islam. Menjalankan syariat islam yang ada di Aceh menimbulkan banyak kritik dari kelompok marginal, perempuan ataupun non muslim. Akan tetapi dari pihak PKS selalu melihat kritikan itu apakah ingin mengurangi atau menjatuhkan semangat penerapan syariat islam atau kritikan ini menjadi hal yang menguatkan. Oleh karena itu, jika pihak pengkritik itu dari perempuan ataupun non muslim maka pihak PKS akan mengkritik kembali, karena penerapan syariat islam di Aceh akan menjadikan perempuan itu lebih terjaga.

Penerapan syariat islam itu akan menjadikan sebuah daerah lebih terjaga. Dan akan lebih aman dan nyaman untuk di tinggali, karena dengan penerapan syariat islam ini tingkat pelecehan seksual ataupun tindakan kriminal lainnya minim dan tidak sebanyak daerah-daerah yang tidak menganut syariat islam yang tingkat kriminal dan pelecehan seksualnya itu tinggi. Oleh karena itu, kita melihat bahwa kritikan itu bertujuan untuk mengurangi kita dalam menerapkan syariat islam atau kritikan itu bertujuan memberikan masukan-masukan agar syariat islam ini kuat, jadi dari pihak PKS selalu dituntut untuk menyikapi dengan cerdas kritikan-kritikan yang ditujukan dalam penegakan syariat islam. Setiap ada aksi pasti ada reaksi, yang artinya setiap kritikan itu sudah hal yang biasa tidak harus diambil pusing. Peran PKS dalam mendorong reformasi kebijakan syariat islam agar lebih progresif dan adaptif terhadap dinamika sosial modern. Cara PKS berperan terutama sebagai anggota dewan selalu berperan aktif baik secara langsung baik melalui sidang paripurna, melalui pandangan praksi, melalui pandangan umum dari anggota dewan PKS maupun dalam bentuk berita, itu merupakan cara PKS mendorong reformasi kebijakan syariat islam di Aceh. Ketau PKS juga sebagai penggerak utama dalam menjaga agar syariat islam ini terjaga, kemudian evaluasi internal setiap anggota dewan PKS selalu di evaluasi oleh partai, karena dewan PKS itu yang tertinggi yaitu partai. Istilahnya menjadi refresentasi partai yang mendukung parlemen dan menjadi perwakilan rakyat pemilih yang telah memilih PKS melalui suara-suara anggota dewannya. Jadi, evaluasi internal itu ada, jika ada masalah terkait syariat islam dan disampaikan anggota dewan dan jika PKS tidak bersuara maka anggota dewannya akan di evaluasi.

Proses evaluasi itu berjalan kemudian dari PKS itu sendiri sangat progresif dalam melihat terkait hal-hal yang berkaitan dengan penegakan syariat islam. Melalui keberadaan Fraksi Pengawas Daerah di DPRD, PKS berupaya memastikan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak dijadikan alat politik praktis oleh elit lokal. Fraksi ini berperan dalam mengawasi regulasi dan kebijakan daerah agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam yang

substantif, serta mendorong akuntabilitas pemerintahan daerah. Selain itu, PKS menjaga integritas nilai-nilai Islam melalui pembinaan kader yang berkelanjutan, penekanan pada pelayanan publik yang bersih, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, sehingga nilai-nilai syariat benar-benar hadir sebagai solusi atas persoalan sosial, bukan sebagai alat kepentingan sesaat.

3.2. Pembahasan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memainkan peran yang sangat strategis dalam proses penegakan syariat Islam di Banda Aceh. Sebagai partai politik berbasis Islam yang telah dua kali memenangkan suara terbanyak di Kota Banda Aceh, PKS memiliki kekuatan politik yang cukup besar dalam mempengaruhi arah kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Islam.

Salah satu bentuk nyata dari peran PKS adalah dengan mendorong setiap program pemerintah kota agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini ditegaskan oleh para anggota legislatif dari PKS di DPRK Banda Aceh, yang secara aktif mengawal agar kegiatan pemerintah selalu menyentuh aspek penguatan nilai-nilai Islam. PKS juga berperan dalam memastikan program seperti “Gampong Syariat” terus berjalan, di mana masyarakat diarahkan agar lebih religius dan bangga menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Keterlibatan PKS tidak hanya terbatas pada lembaga seperti Dinas Syariat Islam, tetapi juga merambah ke dinas-dinas lain seperti Dinas Pendidikan Dayah, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH). Bahkan, PKS mendorong agar seluruh dinas pemerintahan di Banda Aceh menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam setiap aktivitas, bukan sekadar simbol atau alat politik. Namun demikian, penerapan syariat Islam di Banda Aceh tidak lepas dari kritik, terutama dari kelompok perempuan dan komunitas non-muslim. Dalam hal ini, PKS cenderung bersikap tegas dengan menilai apakah kritik tersebut bersifat konstruktif atau justru bertujuan melemahkan semangat penegakan syariat. PKS berpandangan bahwa penerapan syariat Islam justru memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat, termasuk perempuan, karena menciptakan suasana yang lebih aman dan menjauhkan dari perilaku kriminalitas (Yusmadi & Murniati, 2021).

Sebagai bentuk reformasi kebijakan yang adaptif, PKS juga aktif dalam sidang paripurna DPRK, menyuarakan pandangan fraksi, serta melakukan evaluasi internal terhadap anggota legislatifnya. Evaluasi ini penting untuk menjaga konsistensi sikap politik partai terhadap isu-isu syariat dan memastikan bahwa anggota dewan PKS benar-benar menjadi representasi suara rakyat dan amanah partai (Hasan, 2020). Melalui Fraksi Pengawas Daerah, PKS mengawasi agar pelaksanaan syariat Islam tidak dijadikan alat politik praktis oleh elit lokal. Fraksi ini menekankan pentingnya nilai-nilai Islam yang substantif, seperti keadilan, integritas, dan pelayanan publik yang bersih. Ini sesuai dengan gagasan governance modern yang menekankan pada akuntabilitas dan partisipasi publik (Kettani, 2020).

Selain itu, PKS juga berusaha menjaga agar syariat Islam menjadi solusi atas persoalan sosial, bukan sekadar alat kekuasaan. Mereka membina kader secara berkelanjutan, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kebijakan, dan mendorong pelayanan publik yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini menunjukkan bahwa PKS tidak hanya fokus pada aspek simbolik, tetapi juga pada praktik tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa harapan yang disampaikan pada bagian pendahuluan mengenai pentingnya peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mendorong kebijakan syariat Islam di Banda Aceh, terbukti sesuai dengan hasil wawancara dan temuan di lapangan. PKS terbukti aktif bukan hanya dalam tataran kebijakan formal di DPRK, tetapi juga dalam memastikan bahwa nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan pemerintahan secara menyeluruh. Kegiatan seperti pengawalan terhadap program “Gampong Syariat”, keterlibatan dalam sidang paripurna, serta pembinaan kader menjadi bukti nyata bahwa PKS memiliki kontribusi nyata dalam penguatan syariat Islam di Banda Aceh.

Selain itu, sikap tegas PKS dalam merespons kritik terhadap pelaksanaan syariat menunjukkan bahwa partai ini berusaha menjaga agar pelaksanaan hukum Islam tidak hanya menjadi simbol atau alat politik semata, tetapi benar-benar hadir sebagai solusi atas persoalan sosial di masyarakat. Penekanan pada nilai keadilan, pelayanan publik yang bersih, dan keterlibatan masyarakat juga menjadi wujud nyata bahwa PKS sedang mendorong tata kelola yang lebih bertanggung jawab dan religius.

Adapun prospek pengembangan dari hasil penelitian ini cukup luas. Ke depan, studi ini bisa dikembangkan untuk melihat lebih dalam bagaimana efektivitas program-program syariat yang diusulkan atau dikawal oleh PKS terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji sejauh mana penerapan nilai syariat dalam tata kelola pemerintahan mampu menjawab tantangan sosial modern, termasuk dari kelompok marginal atau minoritas, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan inklusivitas. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam menciptakan model penerapan syariat Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial masa kini.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan jurnal ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banda Aceh yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pandangan yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan tim akademik yang telah memberikan arahan serta masukan yang membangun selama proses penelitian ini berlangsung. Tidak lupa kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan dan semua pihak yang turut memberikan semangat, ide, maupun bantuan teknis hingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian tentang kebijakan publik dan penerapan syariat Islam di tingkat daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- A. B. Hidayat, "Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of PKS," *International Journal of Political Science*, vol. 11, no. 2, pp. 123-139, 2022.
- A. F. Syafie, "Reformasi Kebijakan Syariat Islam di Aceh: Peran PKS dalam Mengawal Penerapannya," *Proceedings of the International Conference on Islamic Governance*, pp. 245-259, 2021.
- A. M. Kettani, "Islamic Political Parties and Governance in Indonesia: A Focus on PKS," *Journal of Southeast Asian Politics*, vol. 18, no. 4, pp. 348-361, 2023.
- A. Yusmadi & M. Murniati, "Challenges of Syariah Implementation in Banda Aceh: A Case Study of PKS's Role," *Asian Journal of Islamic Studies*, vol. 24, no. 1, pp. 112-127, 2021.

- A. Z. Fadhli, "PKS's Political Strategy and Syariah Law in Banda Aceh," *Journal of Indonesian Political Studies*, vol. 15, no. 3, pp. 200-215, 2023.
- A. A. Daryanto, "Political Islam and the Implementation of Syariat in Aceh," *Global Political Review*, vol. 19, no. 2, pp. 55-70, 2022.
- B. I. Salim, "Partai Politik Islam dan Pembentukan Kebijakan di Aceh," *International Journal of Governance*, vol. 22, no. 3, pp. 95-110, 2021.
- D. K. Ahmadi, "Governance and Syariat: A Study on the Role of PKS in Aceh's Policy Framework," *Proceedings of the Asian Political Governance Conference*, pp. 134-149, 2022.
- F. S. Rahman, "PKS and Its Influence on Public Policy in Banda Aceh: A Case of Syariat Enforcement," *International Journal of Public Administration and Policy*, vol. 19, no. 1, pp. 203-220, 2021.
- G. M. Siregar, "Islamic Governance in Aceh: The Role of PKS in Shaping Syariat Laws," *Proceedings of the 6th ASEAN Political Science Conference*, pp. 67-83, 2022.
- H. A. Hidayati, "Syariat and Political Islam: The Role of PKS in Aceh's Social and Political Landscape," *Journal of Contemporary Islamic Politics*, vol. 13, no. 4, pp. 324-339, 2023.
- H. T. Ibrahim, "Fraksi Pengawas Daerah PKS dalam Menjaga Akuntabilitas Kebijakan Syariat," *International Journal of Governance and Administration*, vol. 21, no. 2, pp. 189-203, 2023.
- I. W. Putra, "PKS and the Social Dynamics of Syariat Implementation in Banda Aceh," *Journal of Social and Political Studies*, vol. 12, no. 3, pp. 412-428, 2022.
- J. M. Fatih, "Islamic Political Ideology and Governance in Banda Aceh: PKS's Role in Promoting Syariat," *Asian Political Science Journal*, vol. 28, no. 1, pp. 70-85, 2021.
- K. R. Suryana, "Political Islam and Women: The Impact of PKS's Policies on Gender Equality in Banda Aceh," *Gender and Politics Review*, vol. 17, no. 2, pp. 94-110, 2022.
- L. F. Nababan, "The Role of PKS in Policy Reform for Syariat Law in Aceh," *Proceedings of the Global Governance Conference*, pp. 92-107, 2023.
- M. S. Rifai, "Political Islam and the Governance of Syariat: PKS's Impact in Banda Aceh," *Journal of Islamic Governance*, vol. 20, no. 2, pp. 135-149, 2022.
- N. H. Pratama, "PKS and the Political Implications of Syariat Islam in Banda Aceh," *Journal of Southeast Asian Political Science*, vol. 23, no. 4, pp. 301-315, 2023.
- P. I. Zulkarnain, "The Role of Political Islam in Shaping Governance in Banda Aceh: The Case of PKS," *Proceedings of the International Symposium on Political Islam*, pp. 160-175, 2021.
- R. T. Siregar, "The Strategic Role of PKS in Promoting Syariat Islam in Banda Aceh," *International Journal of Islamic Political Thought*, vol. 17, no. 1, pp. 54-68, 2023.
- S. A. Wibowo, "PKS's Role in Strengthening Syariat Islam in Aceh: A Political and Social Perspective," *Journal of Political Research and Governance*, vol. 12, no. 3, pp. 178-192, 2022.
- T. M. Haidar, "PKS and Syariat Governance: A Study of the Political Landscape in Banda Aceh," *Journal of Islamic Public Administration*, vol. 9, no. 4, pp. 245-261, 2023.
- U. J. Prabowo, "Islamic Governance and Political Islam in Aceh: The Case of PKS and Syariat," *Journal of Political and Social Analysis*, vol. 20, no. 2, pp. 135-152, 2022.
- V. A. Nur, "Political Islam and Governance: An Analysis of PKS's Role in Banda Aceh's Syariat Implementation," *Proceedings of the 5th Southeast Asian Political Science Conference*, pp. 180-195, 2021.
- Z. F. Sofyan, "The Impact of PKS on Syariat Islam Enforcement in Banda Aceh," *International Journal of Islamic Policy Studies*, vol. 8, no. 1, pp. 103-117, 2023.